

Tantangan Dan Prospek Netralitas Birokrasi Dalam Pemilu 2024 (Studi Kasus Di Kabupaten Bima)

Sadrul Imam¹, Mukhlis Ishaka², Syamsuddin³

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram

^{2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima

Korespondensi Penulis : sadrulimam91@gmail.com

Abstract This research aims to explain the challenges and prospects of bureaucratic neutrality in the 2024 Election in Bima Regency. This study utilizes a qualitative descriptive method and literature review. The research location is in Bima Regency, which is strategically situated to examine case studies and the issues at hand. Data collection techniques consist of literature review, observation, interviews, and documentation. After collecting complete data from the field, the next step is the data analysis phase. In this research, the data analysis technique employs the interactive model, consisting of three main elements: data reduction, data presentation, and conclusion/verification. The research findings indicate that maintaining bureaucratic neutrality in the 2024 Election in Bima Regency requires rigorous oversight, cooperation among relevant institutions, and the enhancement of bureaucratic human resources' quality. Civil servants (ASN) also need to understand the importance of maintaining their neutrality in the 2024 Election to prevent identity politicization, political funding, and the spread of hoaxes. Regulations and guidelines also play a crucial role in preserving bureaucratic neutrality during the elections.

Keywords: Challenge, Prospects, Neutrality, Bureaucracy, Election, 2024

Abstraksi Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tantangan dan prospek netralitas birokrasi dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan Studi Literatur. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Bima, lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat studi kasus dan permasalahan yang terjadi. Teknik pengumpulan data terdiri atas Studi literatur/ Studi kepastakaan, observasi (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi (*documentation*). Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang harus lakukan adalah tahap analisa data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data model interaktif, teknik terdiri dari dari tiga hal utama, yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjaga netralitas birokrasi dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bima memerlukan pengawasan yang ketat, kerjasama antara lembaga terkait, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia birokrasi. ASN juga harus memahami pentingnya menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2024 agar tidak terjadi politisasi identitas, politik uang, dan penyebaran hoaks. Regulasi dan pedoman juga menjadi faktor penting dalam menjaga netralitas birokrasi dalam Pemilu.

Kata Kunci: Tantangan, Prospek, Netralitas, Birokrasi, Pemilu, 2024

Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Pemilu 2024 akan menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia karena akan menentukan arah kebijakan negara selama lima tahun ke depan. Netralitas birokrasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. Netralitas birokrasi dalam Pemilu 2024 menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh birokrasi di Kabupaten Bima.

Kabupaten Bima merupakan salah satu daerah di Indonesia yang akan menggelar Pemilu 2024. Netralitas birokrasi dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bima menjadi fokus utama dalam studi kasus ini. Tantangan dan prospek netralitas birokrasi dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bima sangat penting untuk diungkapkan. Netralitas birokrasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. Netralitas birokrasi juga menjadi

Received Agustus 30, 2023; Revised September 2, 2023; Accepted Oktober 25, 2023

* Sadrul Imam, sadrulimam91@gmail.com

indikator keberhasilan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, tantangan dan prospek netralitas birokrasi dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bima harus diungkapkan secara komprehensif. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh birokrasi dalam menjaga netralitas dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bima antara lain, Politisasi identitas, Politik uang, Hoaks atau berita bohong, Netralitas ASN, TNI, Polri, penyelenggara pemilu, dan semua pihak yang dilarang ikut dalam kampanye.

Tantangan-tantangan tersebut harus dihadapi dengan strategi yang tepat agar netralitas birokrasi dapat terjaga dengan baik. Selain itu, prospek netralitas birokrasi dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bima juga harus diungkapkan. Proyeksi netralitas birokrasi di masa depan akan sangat penting untuk menentukan arah kebijakan negara. Dalam rangka menjaga netralitas birokrasi dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bima, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain: Meningkatkan pemahaman tentang netralitas birokrasi, Meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran netralitas birokrasi, Meningkatkan kerjasama antara lembaga terkait dalam menjaga netralitas birokrasi, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia birokrasi dalam menjaga netralitas.

Dalam studi kasus ini, akan diungkapkan secara komprehensif tantangan dan prospek netralitas birokrasi dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bima. Selain itu, strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk menjaga netralitas birokrasi juga akan diungkapkan secara rinci. Netralitas birokrasi dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bima menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh birokrasi di daerah tersebut.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik. ASN harus menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2024 agar tidak terjadi politisasi identitas. Politisasi identitas adalah upaya memanfaatkan politik identitas untuk kepentingan politik tertentu yang berpotensi menghina, menghasut, dan memecah-belah anak bangsa. Selain politisasi identitas, tantangan lain dalam Pemilu 2024 adalah politik uang. Terminologi politik uang dalam undang-undang pemilu hanya mencakup tiga hal, yaitu saat masa kampanye, saat masa tenang, dan saat pencoblosan.

Tantangan lain dalam Pemilu 2024 adalah hoaks atau berita bohong. Berdasarkan data Mafindo pada tahun 2022, Hoaks Politik mencapai 549 item dari total 1.698 hoaks (32,3%). Selain itu Netralitas ASN, TNI, Polri, penyelenggara pemilu, dan semua pihak yang dilarang ikut dalam kampanye juga menjadi tantangan dalam menjaga netralitas birokrasi dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bima.

Strategi yang dapat dilakukan untuk menjaga netralitas birokrasi dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bima antara lain meningkatkan pemahaman tentang netralitas birokrasi.

Pemahaman yang baik tentang netralitas birokrasi akan membantu ASN, TNI, Polri, penyelenggara pemilu, dan semua pihak yang dilarang ikut dalam kampanye untuk memahami pentingnya menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Selain itu, pengawasan terhadap pelanggaran netralitas birokrasi juga harus ditingkatkan. Pengawasan yang ketat akan membantu dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran netralitas birokrasi dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bima.

Kemudian kerjasama antara lembaga terkait juga harus ditingkatkan. Kerjasama yang baik antara lembaga terkait akan membantu dalam menjaga netralitas birokrasi dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bima. Selain itu, kualitas sumber daya manusia birokrasi juga harus ditingkatkan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan membantu dalam menjaga netralitas birokrasi dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bima.

Dalam studi kasus ini, akan diungkapkan secara komprehensif tantangan dan prospek netralitas birokrasi dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bima. Selain itu, strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk menjaga netralitas birokrasi juga akan diungkapkan secara rinci. Dengan demikian, diharapkan studi kasus ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan.

Tinjauan Pustaka

Netralitas Birokrasi

Teori netralitas birokrasi adalah konsep yang menekankan bahwa birokrasi atau aparat pemerintah harus tetap netral dalam menjalankan tugas-tugas administratifnya dan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan politik atau tekanan eksternal. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa birokrasi harus melayani kepentingan umum dan menjalankan tugas-tugasnya dengan keadilan, akuntabilitas, dan efisiensi.

Beberapa poin penting terkait dengan teori netralitas birokrasi termasuk:

1. Tidak campur tangan dalam politik: Birokrasi harus menjauh dari campur tangan dalam kebijakan politik dan kepentingan partai politik. Mereka harus menjalankan tugas-tugas administratif tanpa memihak pada kelompok tertentu.
2. Keadilan dan Akuntabilitas: Birokrasi harus menjalankan tugasnya dengan adil dan akuntabel. Mereka harus menghindari praktik korupsi dan nepotisme, serta menjaga transparansi dalam pengambilan keputusan.

3. Efisiensi dan Profesionalisme: Birokrasi harus beroperasi secara efisien dan profesional. Mereka harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjalankan tugas-tugas administratif dengan baik.
4. Pelayanan Publik: Fokus utama birokrasi adalah melayani kepentingan publik. Mereka harus menjalankan pelayanan publik dengan baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan Studi Literatur. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Bima, lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat studi kasus dan permasalahan yang terjadi. Teknik pengumpulan data terdiri atas Studi literatur/ Studi kepustakaan, observasi (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi (*documentation*). Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang harus lakukan adalah tahap analisa data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data model interaktif, teknik terdiri dari dari tiga hal utama, yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Idrus, 2009).

Hasil dan Pembahasan

Tantangan dan prospek netralitas birokrasi dalam Pemilu 2024: Studi Kasus Kabupaten Bima menjadi fokus utama dalam beberapa sumber dan literatur. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menjaga netralitas birokrasi antara lain pengawasan yang ketat, kerjasama antara lembaga terkait, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia birokrasi. Selain itu, ASN juga harus memahami pentingnya menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2024 agar tidak terjadi politisasi identitas.

Dalam Web Seminar yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Simeulue, dibahas mengenai pentingnya menjaga netralitas ASN dalam Pemilu 2024 dan strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk menjaga netralitas birokrasi. Selain itu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga mengadakan Webinar mengenai netralitas ASN dalam Pemilu 2024. Dalam Webinar tersebut, KASN menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN dalam Pemilu 2024 agar tidak terjadi politisasi identitas. Politik identitas menjadi salah satu tantangan dalam Pemilu 2024. Hal ini disebabkan oleh upaya memanfaatkan politik identitas untuk kepentingan politik tertentu yang berpotensi menghina, menghasut, dan memecah-belah anak bangsa.

Oleh karena itu, Bawaslu RI mengadakan Webinar mengenai Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum Tahun 2024: Pilar Integritas Demokrasi. Dalam Webinar tersebut, Bawaslu RI menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN dalam Pemilu 2024 agar tidak terjadi intervensi yang tidak sah. Selain politik identitas, politik uang juga menjadi tantangan dalam Pemilu 2024. Terminologi politik uang dalam undang-undang pemilu hanya mencakup tiga hal, yaitu saat masa kampanye, saat masa tenang, dan saat pencoblosan. Oleh karena itu, Bawaslu RI menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN dalam Pemilu 2024 agar tidak terjadi politik uang.

Hoaks atau berita bohong juga menjadi tantangan dalam Pemilu 2024. Berdasarkan data Mafindo pada tahun 2022, Hoaks Politik mencapai 549 buah dari total 1.698 hoaks (32,3%). Oleh karena itu, Bawaslu RI menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN dalam Pemilu 2024 agar tidak terjadi penyebaran hoaks. Regulasi dan pedoman juga menjadi faktor penting dalam menjaga netralitas birokrasi dalam Pemilu. SKB tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat menjadi acuan dalam menjaga netralitas birokrasi dalam Pemilu 2024.

Dalam jurnal Ilmu Pemerintahan, Rizki Amaliah (2021) membahas mengenai netralitas birokrasi dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bima. Dalam penelitiannya, Rizki Amaliah menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi netralitas birokrasi dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bima, antara lain politisasi identitas, politik uang, dan hoaks.

Dalam jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dwi Ratna Wulan (2021) membahas mengenai pengaruh regulasi terhadap netralitas birokrasi dalam Pemilu. Dalam penelitiannya, Dwi Ratna Wulan menemukan bahwa regulasi yang jelas dan tegas dapat memperkuat netralitas birokrasi dalam Pemilu.

Kemudian dalam jurnal Ilmu Administrasi Publik, Yulianto (2021) membahas mengenai peran kepemimpinan dalam menjaga netralitas birokrasi dalam Pemilu. Dalam penelitiannya, Yulianto menemukan bahwa kepemimpinan yang baik dapat memperkuat netralitas birokrasi dalam Pemilu. Dalam Webinar yang diselenggarakan oleh Kemensetneg, dibahas mengenai pengawasan netralisasi ASN pada Pemilu 2024.

Bawaslu memiliki 4 hal yang menjadi acuan terhadap pelanggaran, yaitu dasar hukum seperti undang-undang, kerjasama lembaga terkait seperti Kementerian PAN & RB, pengawasan dan penindakan seperti jajaran pengawas Bawaslu, serta pelaksanaan kerjasama seperti keputusan bersama menteri PAN RB. KASN memaparkan tentang pelanggaran netralitas yang telah terjadi, disertai data yang dicantumkan dan dijelaskan secara rinci. Dimana

Penyebab perilaku ASN tidak netral kebanyakan karena adanya ikatan darah atau persaudaraan. Jumlah data menunjukkan bahwa alasan ikatan persaudaraan menduduki tingkat pertama dengan presentase 50,76%". Sebagai contoh, Netralitas ASN Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi salah satu tiang sukses Pemilu Tahun 2024. Keinginan untuk membawa birokrasi netral pada politik dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan terhadap birokrasi. Hal ini lantaran institusi atau kelembagaan yang dipimpin birokrat memiliki fungsi dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat bukan semata-mata untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan/atau kelompok tertentu. Dari analisis dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menjaga netralitas birokrasi dalam Pemilu 2024: Studi Kasus Kabupaten Bima menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh birokrasi di daerah tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan yang ketat, kerjasama antara lembaga terkait, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan studi literatur dan analisis data yang telah dilakukan terkait tantangan dan prospek netralitas birokrasi pada pemilu 2024 di Kabupaten Bima maka dapat disimpulkan, bahwa menjaga netralitas birokrasi dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bima memerlukan pengawasan yang ketat, kerjasama antara lembaga terkait, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia birokrasi. ASN juga harus memahami pentingnya menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2024 agar tidak terjadi politisasi identitas, politik uang, dan penyebaran hoaks. Regulasi dan pedoman juga menjadi faktor penting dalam menjaga netralitas birokrasi dalam Pemilu.

Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dilakukan untuk menjaga netralitas birokrasi dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bima:

1. Perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap ASN agar tetap netral dalam Pemilu 2024.
2. Perlu dilakukan kerjasama antara lembaga terkait dan peningkatan kualitas sumber daya manusia birokrasi.
3. Regulasi dan pedoman juga menjadi faktor penting dalam menjaga netralitas birokrasi dalam Pemilu. SKB tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat menjadi acuan dalam menjaga netralitas birokrasi dalam Pemilu 2024.
4. ASN juga harus memahami pentingnya menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2024 agar tidak terjadi politisasi identitas, politik uang, dan penyebaran hoaks.

5. Perlu dilakukan peningkatan kualitas kepemimpinan dalam menjaga netralitas birokrasi dalam Pemilu.
6. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya menjaga netralitas birokrasi dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bima.
7. Perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia birokrasi dalam hal pengetahuan dan pemahaman mengenai netralitas birokrasi dalam Pemilu 2024.
8. Perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap politik uang dan penyebaran hoaks dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bima.

Daftar Pustaka

- Amaliah, Rizki. (2021). Netralitas Birokrasi dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Harianja, Ronny S. 2019. "Pemilu Indonesia 2019: Antara Pendidikan Kewarganegaraan dan Partisipasi Politik." *Simpul Media*,
- Moleong, Lexy J. 2009, "Metodologi Penelitian Kualitatif." Remaja Rosdakarya,
- Purnama, Cecep Syarifuddin, dkk. 2015. "Tantangan Penegakan Hukum Dan Netralitas Birokrasi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum." *Pustaka Yustisia*,
- Suharto, Edi. 2008. "Birokrasi: Konsep, Teori, Dan Paradigma Administrasi Negara." *Pustaka Pelajar*
- Wulan, Dwi Ratna. (2021). Pengaruh Regulasi terhadap Netralitas Birokrasi dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Yulianto. (2021). Peran Kepemimpinan dalam Menjaga Netralitas Birokrasi dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.

Peraturan-Peraturan

- Kementerian PAN & RB. (2021). Keputusan Bersama Menteri PAN RB.
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). Pedoman Pengawasan Netralitas ASN pada Pemilu 2024.
- Kementerian Hukum dan HAM. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penanganan Informasi Hoaks pada Pemilu 2024.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Politik dan Pemilu.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2021). Peraturan Menteri Sekretariat Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas ASN pada Pemilu 2024.
- KPU Kabupaten Bima. (2021). Rencana Strategis KPU Kabupaten Bima 2021-2025.
- Bawaslu Kabupaten Bima. (2021). Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2019 di Kabupaten Bima.

- Pemerintah Kabupaten Bima. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima 2021-2026.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima. (2021). Kabupaten Bima dalam Angka 2021.
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemilu 2024.
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemilu 2024.
- Kementerian Hukum dan HAM. (2021). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemilu 2024.